

PRRI/Permesta dalam Pandangan Sejarahwan Dr. RZ Leirissa

La Malihu

*Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Makassar
E-mail: lam2005unm@yahoo.com*

ABSTRAK

Sejarah PRRI/Permesta telah ditulis dalam berbagai bentuk karya ilmiah. Namun, menurut sejarawan RZ Leirissa, sejumlah karya PRRI/Permesta cenderung berat sebelah karena tidak memperhatikan persepsi pemimpin di daerah yang bergejolak. Untuk itu, Leirissa mencoba melihat sejarah PRRI/Permesta dari sudut pandang yang lebih netral dengan menggunakan metode sejarah lisan dan pendekatan struktural. Dari hasil analisis data arsip dan wawancara dengan sejumlah aktor terkemuka, Leirissa menyimpulkan bahwa PRRI/Permesta sebenarnya bukan gerakan pemberontakan, juga bukan hanya isu pusat dan daerah, tetapi juga terkait dengan perbedaan konsep pembangunan dan pembangunan, sekaligus masalah sipil-militer. Oleh karena itu, menurut Leirissa, PRRI/Permesta tidak bisa disamakan dengan DI/TII di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan serta RMS di Maluku.

Kata Kunci: PRRI/Permesta, Metode Sejarah, Sipil-militer

I. PENDAHULUAN

Sampai saat ini telah ada beberapa tulisan mengenai PRRI/Permesta diterbitkan, baik yang ditulis oleh orang Indonesia[1] maupun asing; berupa buku, artikel di Jurnal, maupun tulisan lepas di majalah dan surat kabar. Sejarawan Indonesia yang melakukan studi khusus tentang PRRI/Permesta adalah Dr. RZ Leirissa (almarhum), Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia. Hasil studinya dituangkan dalam buku "PRRI PERMESTA: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis".[2] Buku ini berisi ulasan Dr. Leirissa terhadap sejarah PRRI/Permesta dari sudut pandang yang berbeda dari apa yang diketahui umum selama ini.

Menurut Leirissa, meski tulisan-tulisan yang ada sekarang ada yang mencoba memahami masalah PRRI/Permesta secara sungguh-sungguh, namun ada pula yang secara apriori mengecam tanpa dukungan fakta yang memadai. Menurut mereka yang mengecam itu umumnya kurang memperhatikan argumentasi dan persepsi tokoh-tokoh di daerah bergolak, sehingga penarikan kesimpulan seringkali terkesan berat sebelah. Atas dasar kenyataan itu Leirissa mencoba memahami persoalan PRRI/Permesta[3] dari sudut pandang yang lebih netral dengan memperhatikan juga persepsi dan argumentasi tokoh-tokoh di daerah bergolak. Berkat dukungan data wawancara dan arsip serta penggunaan

metode sejarah lisan dan pendekatan strukturalistik, Leirissa mencoba memberi perspektif baru dalam melihat sejarah PRRI/Permesta dan berhasil menemukan suatu kesimpulan yang jauh dari apa yang diketahui umum selama ini.

II. KERANGKA METODOLOGIS

Satu hal yang baru dalam perkembangan metode sejarah adalah munculnya metode sejarah lisan dengan berbagai variasinya. Penggunaan metode sejarah lisan tampak sangat menonjol dalam penelitian buku ini. Ini dimungkinkan oleh karena – saat penelitian dilakukan – para tokoh kunci PRRI/Permesta umumnya masih hidup. Apalagi targetnya memang untuk memahami (juga) persepsi dan argumentasi para pemimpin di daerah bergolak yang dijadikan alasan mengapa mereka mencetuskan PRRI/Permesta. Pemahaman atas persepsi dan argumentasi para pemimpin di daerah bergolak memang tidak cukup memadai jika hanya mengandalkan data-data arsip, tetapi harus dengan dukungan fakta yang digali lewat wawancara mendalam dari para tokoh pelaku.

Apabila Barbara[4] menganalisis permasalahan PRRI/Permesta dengan menggunakan pendekatan *center-periphery*, maka Leirissa menganalisisnya dengan pendekatan strukturalistik. Ia tampak begitu piawai menerapkan pendekatan ini. Bukan saja karena didukung oleh faktor kemampuan, tetapi juga karena buku ini diharapkan bisa menjadi contoh penulisan sejarah strukturalistik di Indonesia.

Dalam metodologi strukturalistik, masyarakat dipandang sebagai suatu struktur yang nyata dari aturan, peran-peran, relasi-relasi, dan makna-makna yang dihasilkan dan berubah oleh para individu yang merupakan kondisi sebab akibat dari tindakan, keyakinan, dan keinginan-keinginannya. Pendekatan ini

berusaha mengkonseptualisasi dan mengkaji proses pembentukan struktur dalam jangka waktu tertentu dengan memeriksa interaksi sebab-akibat dari para individu, kelompok-kelompok, kelas-kelas dan penstrukturan kondisi-kondisi sosial, keyakinan-keyakinan dan keinginan-keinginan mereka.

Pendekatan strukturalistik berisi sejumlah konsep, yaitu *agency*, struktur sosial, *mentelite*, dan *causal factors*. *Agency* secara umum dihubungkan dengan dua pengertian, yaitu: (1) Kekuatan otonom yang sungguh-sungguh ada atau bagian dari system untuk mendatangkan akibat; (2) Kekuatan dari seseorang untuk melakukan tindakan yang mendatangkan keberhasilan. *Agency* tidak mampu berdiri sendiri tanpa struktur sosial. Struktur sosial terdiri dari komponen-komponen: *rules*, *roles*, dan *interaction*, yang tidak bisa difahami secara hermeneutika karena merupakan *unobservables* dan tidak dapat ditangkap dengan panca indra, kecuali bila diteorikan. Sebaliknya, *agency* sifatnya konkret dan dapat ditangkap panca indra. *Mentelite* diartikan: “bagaimana mereka memahami diri mereka sendiri, dunia mereka, dan bagaimana mereka mengekspresikan diri melalui agama, ritual, busana, musik, dan sebagainya. *Mentelite* adalah kemampuan yang dimiliki manusia sehingga dapat berperan sebagai *agency* dalam reproduksi dan transformasi sosial. Sedangkan *causal factors* merupakan hasil interaksi antara *agency* dengan struktur sosial, dan di sinilah aspek analitis dari metodologi strukturalistik. Interaksi ini mengakibatkan reproduksi atau transformasi sosial.[5]

Interaksi antara *agency* dan struktur sosial di satu pihak dan teori di pihak lain dihubungkan oleh *ekspresed intention*. *Ekspressed intention* adalah maksud yang diekspresikan melalui bahasa dan atau tulisan dari pelaku sejarah, dan merupakan landasan bagi pelaku sejarah untuk melakukan sesuatu.

Dengan demikian *ekspresed intention* dapat juga dikatakan sebagai *mentallite*. *Ekspressed intention* dapat diketahui melalui sumber-sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian.

Jadi jelaslah pendekatan strukturalistik memberi peran pada unsur manusia. Perubahan terjadi bukan karena struktur tapi karena manusia. Di sini kerangka pemikiran dibangun dengan bertolak dari teori dan empiri, sehingga pembahasan karya sejarah model strukturalistik selalu dimulai dari analisis terhadap situasi sejarah. Dalam karya Leirissa ini, penggunaan prosedur kerja strukturalistik tampak pada analisisnya terhadap kondisi Indonesia menjelang peristiwa PRRI/Permesta. Di sini dijelaskan bagaimana sketsa berbagai struktur geografis, politik, ekonomi, sosial, dan militer, khususnya Angkatan Darat. Apa yang terjadi ketika itu seperti kegagalan sistem politik, kegagalan pembangunan ekonomi, ancaman komunis, serta kegoncangan dalam tubuh Angkatan Darat dilihat sebagai implikasi dari pelaksanaan UUDS yang lebih menekankan segi formal legalistik. Dan inilah yang mendorong tampilnya tokoh-tokoh militer di daerah bergolak untuk memberikan koreksi dan selanjutnya mengintrodusir model pembangunan alternatif.

Apa yang tampak ketika itu adalah terjadinya polarisasi di dalam tubuh Angkatan Darat antara kelompok perwira di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) dengan kelompok Perwira di daerah bergolak. Ini berarti telah terjadi perubahan struktur dalam tubuh militer. Secara teori, institusi militer merupakan *tightly structured* (struktur ketat), namun dengan polarisasi ini struktur militer telah berubah menjadi *loosely structure* (struktur longgar).

Perubahan struktur ini terjadi karena adanya *agency*. Dalam konteks PRRI/Permesta, orang seperti Zulkifli Lubis,

Ahmad Husein, Simbolon, Dahlan Zambek, Ventje Sumual, Saleh Lahade, Warrow, dan lain-lain dapat disebut sebagai *agency*. Mereka terdorong untuk melakukan perubahan karena faktor *mentality*, yaitu bagaimana mereka memahami diri mereka (sebagai kelompok intelektual dan perwira yang memiliki kemampuan), dunia mereka (di luar Jawa dan terabaikan), yang kemudian diekspresikan (*ekspresed intention*) melalui tindakan (mencetuskan PRRI/Permesta). Tindakan ini hanya dapat dilakukan kalau didukung kemampuan sebagai *agency*. *Agency* hanya dapat mengubah struktur karena mereka memiliki kemampuan dan kelebihan. Sejauh mana kemampuan mereka dapat ditelusuri dari latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, dan perjalanan karir mereka.

III. BEBERAPA TEMUAN

Dalam buku ini Leirissa mencoba menganalisa dan menjawab sebuah pertanyaan kunci "Mengapa terjadi PRRI/Permesta". Mula-mula, Leirissa menjelaskan perkembangan situasi daerah bergolak menjelang PRRI/Permesta. Menurutnya, masalah yang timbul di sana pada mulanya hanya berkisar pada masalah militer. Namun pada perkembangan selanjutnya berkait pula dengan masalah lain dalam jangkauan yang lebih luas, yang kemudian melahirkan Dewan Banteng di Padang, Dewan Gajah di Medan, Dewan Garuda di Palembang, dan Permesta di Sulawesi.

Leirissa berusaha menjelaskan PRRI/Permesta lebih dari apa yang diketahui umum selama ini. Di sini ia mencoba memberi kesan bahwa masalah PRRI/Permesta sebenarnya bukan sekedar ketegangan antara pusat dan daerah karena hal seperti itu sesungguhnya sudah ada sejak zaman Majapahit. Menurutnya, kesenjangan antara pusat dan daerah di pertengahan tahun 1950-

an terjadi karena adanya pendapat bahwa perkembangan politik di pusat ketika itu tidak memungkinkan terselenggaranya pembangunan Nasional. Inilah yang mendorong tampilnya tokoh-tokoh militer di daerah. Jika pada tahap awal mereka hanya menyoroti masalah militer dan keamanan dalam lingkup terbatas, maka setelah diadakan pertemuan mereka juga mulai menyoroti masalah lain yang lebih luas sehingga menjangkau pula masalah yang bersifat Nasional. Dalam sebuah artikel berjudul "Sebab Musabab Pembentukan PRRI", Leirissa memberi penjelasan lebih lanjut bahwa PRRI/Permesta muncul karena kepentingan dari kalangan masyarakat tertentu yang belum terwujud. Hal ini menimbulkan kesan dari beberapa kalangan bahwa birokrasi sipil tidak mampu mengatasi keadaan dan inilah yang melahirkan inisiatif untuk beralih pada eksponen militer di beberapa daerah bergolak. Semua itu tercermin dalam pokok-pokok perjuangan Dewan Banteng, Ikrar 4 Desember dari Dewan Gajah, Piagam Perjuangan Sumatera Selatan dari Dewan Garuda, dan dalam piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).

Kendatipun ada perbedaan, akan tetapi tuntutan yang diajukan oleh para pemimpin di daerah terdapat beberapa persamaan pokok. Paling tidak ada 4 titik persamaan, yaitu: (1) Mengenai pemulihan keutuhan Dwi Tunggal Sukarno-Hatta, (2) Pergantian pucuk pimpinan Angkatan Darat, (3) Penghapusan sentralisme dan pemberian otonomi yang lebih luas terhadap daerah, serta (4) Penolakan atas ikut sertanya komunis dalam pemerintahan.

Sekalipun tuntutan yang diajukan oleh pemimpin militer di daerah berisi rincian menyangkut kepentingan daerah, namun akar masalahnya, menurut Leirissa, bukan hanya sekedar kepentingan daerah belaka tetapi secara substansial menyangkut kepentingan militer atau kepentingan pemahaman dwi fungsi. Memang konsep dwi fungsi pada waktu itu belum ada, namun dalam kenyataan praktek dwi fungsi sudah ada.

Kecenderungan ke arah dwi fungsi sudah sangat tampak sejak tahun 1946. Dan inilah yang menimbulkan konflik laten antara sipil dan militer. Konflik yang semula laten kemudian berubah menjadi manifest dengan terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952. Dalam peristiwa ini militer mencoba "bermain" tetapi gagal. Karena kegagalan inilah sehingga Nasution tidak ikut terlibat dalam PRRI/Permesta. Mengapa Nasution tidak ikut terlibat dalam PRRI/Permesta tidak dijelaskan dalam buku ini, sebab kalau dijelaskan bisa ramai karena banyak mengandung implikasi politik.

Jadi jelaslah bahwa persoalan PRRI/Permesta bukan sekedar persoalan pusat dan daerah, tetapi menyangkut perbedaan dalam hal konsep pembangunan dan sekaligus persoalan sipil-militer. Konsep pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah sipil di pusat tidak diterima oleh pemimpin militer di daerah. Selain itu, pemerintah sipil di pusat mentoleir kehadiran komunis, sementara pimpinan militer (dan umumnya masyarakat) di daerah-daerah luar Jawa anti komunis. Maka perbedaan mengenai konsepsi pembangunan antara pusat dan daerah pun tidak dapat dihindarkan. Inilah yang menyebabkan sehingga buku ini diberi judul "PRRI/Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis".

Polarisasi ini kemudian diperuncing oleh adanya pemahaman para tokoh militer di daerah, bahwa luasnya jangkauan kekuasaan pemerintahan sipil bisa menghilangkan fungsi-fungsi sosial dan militer. Padahal di sisi lain, elit politik di daerah itu lemah. Dan setelah federalisme bubar, keadaan ini mereka nilai berbahaya karena pemerintah berada di atas struktur yang labil dan rapuh. Selain itu mereka juga menilai arah pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusat itu keliru dan bisa membawa malapetaka yang mereka sebut "Madiun kedua". Oleh karena itu mereka mencoba merubah dengan menawarkan dan melaksanakan model pembangunan alternatif menurut konsepsi mereka, tapi tidak diterima

oleh pusat, dan inilah yang sebenarnya yang mendorong timbulnya PRRI/Permesta.

Pertentangan antara tokoh-tokoh militer di daerah dengan pemerintah pusat sebenarnya hampir terselesaikan melalui musyawarah nasional pada tahun 1957. Akan tetapi konsensus yang dirintis dengan susah payah itu akhirnya buyar setelah terjadinya peristiwa Cikini. Tokoh-tokoh militer di daerah – juga beberapa tokoh sipil – dituduh mendalangi peristiwa percobaan pembunuhan terhadap presiden tersebut. Padahal menurut persepsi mereka peristiwa Cikini terjadi sebagai resultant dari kemelut yang berlarut-larut di pucuk pimpinan Angkatan Darat serta lemahnya Kabinet Juanda. Oleh karena itu menurut mereka akan sangat sulit melaksanakan keputusan Munas jika pimpinan Angkatan Darat dan Kabinet Juanda yang dinilai tidak mampu mengendalikan situasi tetap dipertahankan. Untuk itu mereka mengusulkan agar Kabinet diganti dengan kabinet yang dipimpin oleh Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Untuk mengantisipasi tuduhan yang dialamatkan kepada mereka, maka tokoh-tokoh militer daerah bergolak mengadakan pertemuan di Sungai Duren. Di sini Leirissa mencoba mencermati arah pemikiran tokoh-tokoh di daerah bergolak, karena di situlah alasan-alasan terjadinya PRRI/Permesta dikemukakan yang selama ini luput dari perhatian orang. Pertemuan di Sungai Duren selain membicarakan situasi politik pada umumnya, mereka juga menyepakati untuk tidak menyerah begitu saja atas tuduhan terlibat dalam peristiwa Cikini, sebab konsekwensinya berat, apalagi dituduh – tanpa bukti – berusaha membunuh Presiden Sukarno. Sementara di sisi lain mereka telah memperkirakan bahwa KASAD akan menggunakan kekuatan senjata untuk menangkap mereka. Dengan pertimbangan “demi melindungi diri” dan “melanjutkan perjuangan”, maka diputuskan untuk melaksanakan “pertahanan” bersama.

Beberapa pokok pikiran yang dirumuskan di Sungai Duren dalam implementasinya

diupayakan melalui pendekatan terhadap pihak-pihak terkait di Jakarta, namun gagal. Oleh karena itu mereka lalu mengajukan ultimatum kepada Pemerintah Pusat melalui “Piagam Perjuangan Menyelamatkan Negara” tanggal 10 Pebruari 1958. Karena Pemerintah tidak mengindahkan ultimatum itu, bahkan menanggapi dengan ketegasan sikap, maka pecahlah peristiwa PRRI/Permesta dalam bentuk konflik bersenjata.

Walaupun demikian, terutama terhadap Permesta, Leirissa menolak kalau dicap sebagai gerakan separatis. Sebab, baik dalam data wawancara maupun data arsip tidak ditemukan adanya gerakan ke arah itu. Yang terjadi hanyalah ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menyelesaikan berbagai krisis yang terjadi. Dari situlah mereka lalu menawarkan suatu model otoritas dan perencanaan alternatif yang jauh berbeda dengan apa yang ditempuh oleh pusat, disamping penolakan mereka yang begitu keras atas kehadiran komunis.

Malah Leirissa menemukan (dalam dokumen-dokumen arsip) bahwa tokoh-tokoh Permesta di dalam berbagai kesempatan pidato selalu menegaskan kalau mereka “.... Tidak, ulangi Tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia”[6][7]. Mereka juga selalu menekankan pemilihan keutuhan dwi tunggal Sukarno-Hatta dan agar posisi-posisi kunci dalam pemerintahan diberikan kepada mereka yang bersih, jujur, dan memiliki kecakapan yang memadai. Dengan demikian “pembangkangan” mereka terhadap pusat tidak ditujukan kepada otoritas pada tingkat suprastruktur politik, melainkan pada lapis kedua ke bawah, terutama pada sejumlah menteri dan pucuk pimpinan Angkatan Darat.

Leirissa juga menolak kalau Permesta disejajarkan dengan pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, ataupun RMS di Maluku. Sebab Leirissa tidak melihat adanya pembunuhan atau perusakan yang serius yang dilakukan oleh Permesta. Malah ia menemukan sejumlah fakta, bahwa justeru

pembangunan infrastruktur sosial dan politik di daerah yang dilakukan Permesta, lebih dari apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Leirissa lalu mengajukan bukti-bukti pembangunan fisik yang dilakukan Permesta, seperti pembangunan ruas jalan sepanjang 25 km yang menghubungkan Tomohon-Manado, pembangunan sekitar 80 gedung di Manado, Pusat Listrik Tenaga Disel di Makale, Pasar Mattoangin di Makassar, Markas Resimen 23 di Parepare, Pusat Latihan Infanteri di Bilibili, Depot Batalyon di Malino, Markas Resimen Hasanuddin di Jln. Lanto Daeng Pasewang, dan sebagainya. Hal yang sama juga dilakukan di daerah lain, di antaranya, Permesta mendorong pembentukan Provinsi NTT dan pemekaran daerah Flores menjadi 5 kabupaten.

IV. KESIMPULAN

Seperti dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa karya Leirissa ini semata-mata didasarkan pada metode "sejarah lisan" yang terselenggara lewat wawancara dengan para tokoh utama PRRI/Permesta dari tahun 1985 hingga 1989. Namun tampaknya sasaran wawancara hanya terbatas pada tokoh militer dari PRRI/Permesta. Sedangkan tokoh "kunci" dari kalangan sipil seperti Syafruddin Prawiranegara, Mohammad Natsir, dan Sumitro Joyohadikusumo tidak diwawancarai, kendatipun mereka masih hidup saat penelitian dilakukan. Padahal beberapa di antaranya seperti Sumitro Joyohadikusumo, Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan Mr. Assaad, riwayat hidupnya dicantumkan dalam lampiran 1. Mungkin tokoh-tokoh kunci dari kalangan sipil ini tidak diwawancarai karena pembahasan buku ini telah dibatasi pada struktur militer.

Leirissa juga tidak melakukan wawancara dengan para perwira di kalangan MBAD – kecuali Nasution yang memberikan keterangan tertulis. Ia juga tidak melakukan wawancara dengan tokoh militer yang ikut dalam penumpasan PRRI/Permesta. Ini tidak

dilakukan, mungkin karena keterangan mereka sudah cukup dikumpulkan oleh Barbara Sillers Harvey, dan juga karena tekanan pembahasan buku ini bukan pada aspek perangnya, tapi untuk mengetahui argumen dan persepsi tokoh-tokoh yang ada di daerah-daerah bergolak. Dengan demikian keterangan dari tokoh-tokoh militer di MBAD ataupun yang ikut terlibat dalam penumpasan PRRI/Permesta menjadi tidak relevan untuk tujuan ini.

REFERENSI

- [1] M. Zed and H. Chaniago, "PRRI dalam Perspektif Militer dan Politik Regional: Sebuah Reinterpretasi," *J. Stud. Amerika*, 1999.
- [2] R. Z. Leirissa, *PRRI, Permesta: strategi membangun Indonesia tanpa komunis*. Pustaka Utama Grafiti, 1991.
- [3] R. Z. Leirissa, "Sebab-musabab pembentukan PRRI," *J. Stud. Amerika Vol. IV, (Januari-Juli 1999)*, 146-149., 1999.
- [4] B. S. Harvey, *Permesta: pemberontakan setengah hati*. Pustaka Utama Grafiti, 1989.
- [5] C. Lloyd, "The structures of history," in *(Oxford: Blackwell, Oxford: Blackwell, 1993*.
- [6] L. Malihu, Y. Rochwulaningsih, and D. R. Puguh, "Tracing the Notion of Rural Environmental Development Concept by M. Saleh Lahade, South Sulawesi in 1950s," in *E3S Web of Conferences*, 2020, vol. 202, p. 7047.
- [7] N. A. Laila Badru, M. Bosra, and A. Ahmadin, "Herman Nicolas Ventje Sumual: Studi tentang Keterlibatannya dalam Permesta (1957-1961)," *J. Pattingalloang*, vol. 7, no. 3, pp. 297–307, 2020.